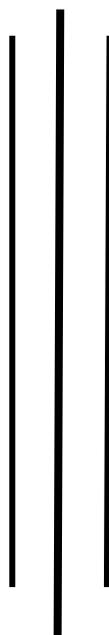




**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2022**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR                   TAHUN 2022  
TENTANG  
RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

**RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir

Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan yang terakhir Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas

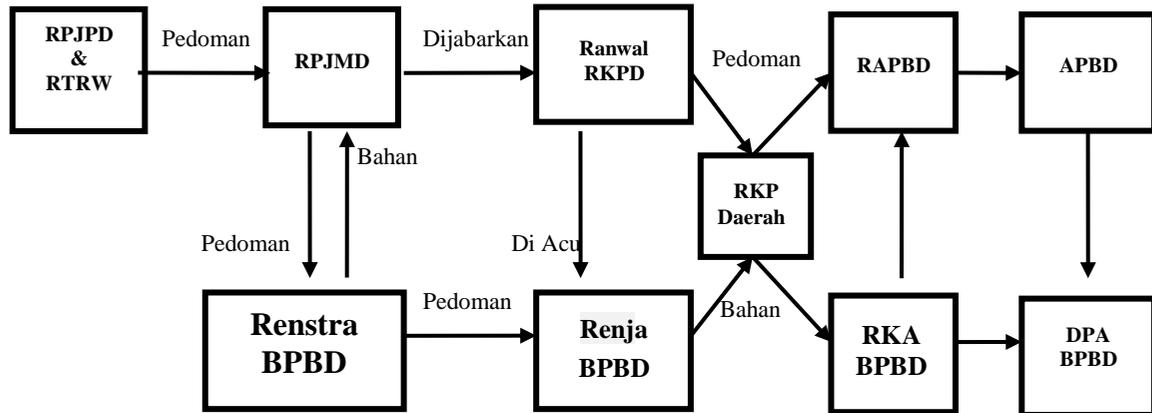
pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat

Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

#### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Rencana Akhir Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2023 dimana RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2023 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malang selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 5 Bupati Malang yaitu Memperluas Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Seni Budaya, Perindustrian, Pariwisata dan Pembangunan Berkelanjutan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 241 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 241 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 11 Seri D).
23. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Nomor : 005/1165/35.07.031/2021, tanggal 7 Desember 2021, perihal Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023;

24. Surat Edaran Bupati Malang, Nomor 3156 Tahun 2022, tanggal 13 April 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
25. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Nomor : 050/4734/35.07.202/2022, tanggal 18 April 2022, perihal : Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
26. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Nomor : 050/5739/35.07.202/2022, tanggal 18 Mei 2022, perihal : Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2023 :

- 1) Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2023 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;

- 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- 4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2023 :

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Perangkat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPBD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2021-2026 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 dikatakan mengalami keberhasilan antara lain :

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan antara lain

A. Pada Indikator Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target 100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (33 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 100% dapat dikatakan **berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dengan kegiatan :

1. Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

1.1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi kebencanaan dilaksanakan di 57 wilayah sebagai berikut :

- a. Bulan Januari : 4 wilayah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Wirotaman Kecamatan Dampit, Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo, dan Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading;
- b. Bulan Februari : 1 wilayah di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau;
- c. Bulan Maret : 14 wilayah di Desa Ngabab Kecamatan Pujon, Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, Desa Langlang Kecamatan Singosari, Desa Bedali Kecamatan Lawang, Desa Bocek Kecamatan Karangploso, Desa Kluwut Kecamatan Wonosari, Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji, Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi, Desa Poncokusumo

Kecamatan Poncokusumo, Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan, Desa Bantur Kecamatan Bantur, Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir, Desa Kidangbang Kecamatan Wajak, dan Desa Ngajum Kecamatan Ngajum;

- d. Bulan April : 12 wilayah di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang, Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, Desa Kalipare Kecamatan Kalipare, Desa Tumpang Kecamatan Tumpang, Desa Sumberporong Kecamatan Lawang, Desa Dengkol Kecamatan Singosari, Desa Pakis Kecamatan Pakis, Desa Kemantren Kecamatan Jabung, Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran, Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Kromengan Kecamatan Kromengan, dan Desa Tajinan Kecamatan Tajinan;
- e. Bulan September : 12 wilayah di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Pagak Kecamatan Pagak, Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung, Desa Srigonco Kecamatan Bantur, Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare, Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, Desa Urek Urek Kecamatan Gondanglegi, Desa Jabung Kecamatan Jabung, Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan, Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon, Desa Sidoluhur, dan Kecamatan Lawang;
- f. Bulan Oktober : 6 wilayah di Desa Argoyuwono Kecamatan Ampelgading, Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso, Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo, Desa Duwet Kecamatan Tumpang, Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, dan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo; dan
- g. Bulan November : 8 wilayah di Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon, Desa Wono Agung Kecamatan Tirtoyudo, Desa Gedangan Kecamatan Gedangan, Desa Taman Asri Kecamatan Ampelgading, Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak, Desa Sumberbening Kecamatan Bantur, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Desa Banjararum Kecamatan Singosari.

## 1.2 Pengurangan Resiko Bencana.

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2025 dilakukan oleh jasa konsultan CV. Irama Tembang Elok pada bulan November-desember 2020.

Dokumen RPB Covid-19 Kabupaten Malang merupakan rencana dan panduan yang bersifat lintas sektor dan lintas bidang dalam rangka penanggulangan bencana yang masa berlaku selama 5 (lima) tahun (2020-2025). RPB Covid-19 Kabupaten Malang diharapkan dapat menjadi bagian yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang pada prioritas pembangunan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang.

Tujuan penyusunan RPB Covid-19 Kabupaten Malang adalah:

1. Panduan daerah dalam penanggulangan bencana terkait pengaruh utama akan isu dan upaya penanggulangan bencana di dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kabupaten Malang;
3. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Malang menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
4. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dari ancaman bencana.

RPB Covid-19 Kabupaten Malang mempunyai sasaran sebagai pedoman bagi pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang dan masyarakat. Sedangkan sasaran substansial dar PRB Covid-19 Kabupaten Malang adalah:

1. Terarah dan sinergisnya langkah-langkah terkait penanggulangan bencana di tataran Pemerintah Kabupaten Malang serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Adanya penurunan resiko bencana serta peningkatan ketahanan masyarakat dan lingkungan fisik di wilayah Kabupaten Malang terhadap ancaman bencana yang potensial terjadi;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### 1.3 Mitigasi Non struktural

Kegiatan Mitigasi Non Struktural Kabupaten Malang Tahun 2020 melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Ancaman Gempa Bumi di Kabupaten Malang Tahun 2020 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) kali pertemuan yang bertempat di Hotel Syariah Radho Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Inspektorat, Bappeda, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, DP3A, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPKPCK, Satpol PP, RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang, Bagian Hukum Setda, PMI dan BPBD Kabupaten Malang.

Pertemuan pertama pada tanggal 19 November 2020 bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal potensi gempa yang mungkin terjadi di Kabupaten Malang, melakukan perkiraan dampak yang terjadi akibat gempa yang berpotensi terjadi, dan menyusun rencana awal respon darurat ketika terjadi gempa. Hasil yang diharapkan adalah adanya gambaran awal skenario kejadian gempa yang berpotensi di Kabupaten Malang, adanya gambaran awal skenario dampak dan langkah penanganan bencana yang terjadi akibat gempa, dan adanya dokumen rencana kontijensi untuk merespon secara cepat dan tepat dampak gempa.

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 yang bertujuan untuk mendapatkan review tentang draft nol Dokumen Rencana Kontijensi, melakukan review perkiraan dampak yang terjadi akibat gempa yang berpotensi terjadi, dan melakukan review rencana awal respon darurat ketika suatu

saat terjadi gempa. Hasil yang dicapai adalah adanya draft nol dokumen rencana kontijensi yang telah di review oleh peserta kegiatan.

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 yang bertujuan untuk melegalkan dokumen rencana kontijensi ancaman gempa bumi di Kabupaten Malang 2020.

1.4 Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH) yang dilaksanakan di 7 Sekolah sebagai berikut :

- a. Bulan Februari : 5 Sekolah yaitu SDA Ar Rohmah Kecamatan Dau, SDN I Pojok Kecamatan Dampit, SDN I Sumberagung Kecamatan Ngantang, SDN I Kaumrejo Kecamatan Ngantang, dan SDN IV Wandanpuro Kecamatan Bululawang; dan
- b. Bulan Maret : 2 Sekolah yaitu MI Nasyrul Ulum Bocek Kecamatan Karangploso, dan SDN II Wonorejo Kecamatan Singosari.

2. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana dengan indikator :

2.1 Desa Tangguh Bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo pada tanggal 16 s/d 18 Desember 2020; Desa Gunungjati Kecamatan Jabung pada tanggal 23 s/d 25 Desember 2020; dan Desa Petungsewu Kecamatan Dau pada tanggal 28 s/d 30 Desember 2020. Dalam setiap kegiatan pelatihan dihadiri tim pokja destana sebanyak 30 orang. Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Timur yaitu Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan pada tanggal 26 s/d 27 dan 29 Februari 2020 dan Desa Bocek Kecamatan Karangploso pada tanggal 2 s/d 4 Maret 2020. Desa Tangguh Bencana yang terbentuk diharapkan masyarakat mampu menghindari dan menyelamatkan diri dari resiko bencana. Bahkan ke depan mereka juga mampu mencegah kemungkinan terjadinya bencana melalui kegiatan pengurangan resiko bencana.

2.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pengadaan dan pembelian rambu-rambu peringatan dan jalur evakuasi

sebanyak 50 buah untuk diberikan kepada daerah rawan bencana.

### 2.3 Pembentukan Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS)

Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mengadakan rapat koordinasi terkait tugas pokok dan fungsi Pusdalops serta mengadakan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas Pusdalops berupa :

- a. Smart Phone sebanyak 1 Unit;
- b. Laptop sebanyak 2 Unit; dan
- c. Televisi LED (32 inchi standar).

B. Pada Indikator Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan dengan target 68%, tercapai 68% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (jumlah bencana yang ditangani sebanyak 151 kali dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 151 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 151 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan **berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana, dengan indikator :

#### 1.1 Penanganan Darurat Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tahun 2020 sebanyak 151 kejadian bencana yang telah ditangani, antara lain : Gempa Bumi sebanyak 19 kejadian, Banjir sebanyak 15 kejadian, Angin kencang sebanyak 42 kejadian, Longsor sebanyak 60 kejadian, dan Pohon tumbang sebanyak 15 kejadian. Selama tahun 2020 dalam penanganan bencana telah diberikan bantuan kepada korban bencana berupa paket sembako sebanyak 621 paket sembako dan bronjong sebanyak 535 buah.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar logistik dan Peralatan Bencana, dengan indikator :

#### 2.1 Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan buffer stock sembako yaitu pengadaan 600 paket sembako untuk diberikan kepada korban terdampak bencana.

C. Pada Indikator Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana yang Berhasil Dioperasikan dengan target 47% tercapai 47% perhitungan ini berdasarkan, Capaian 100% dapat dikatakan **berhasil** kegiatan ini didukung oleh Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana dengan kegiatan :

1. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

1.1 SDM Paham Pendampingan Psikososial

Kegiatan ini dilaksanakan berupa Pendampingan Psikososial Pasca Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 Maret 2020 bertempat di Hotel Trio Indah 2 Malang yang dihadiri oleh 30 orang terdiri dari BPBD Kabupaten Malang dan Perangkat Desa yaitu Desa Dengkol Kecamatan Singosari, Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari, Desa Tegalwaru Kecamatan Dau, Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis, Desa Kemiri Kecamatan Jabung, Desa Gunungjati Kecamatan Jabung, Desa Bokor Kecamatan Tumpang, Desa Tumpang Kecamatan Tumpang, Desa Ngijo Kecamatan Karangploso dan Desa Ngenep Kecamatan Karangploso. Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya masalah psikologis serius dan mencegah munculnya perilaku tampilan kondisi kesehatan mental negatif yang disebabkan oleh bencana atau situasi kritis. Diharapkan peserta mampu mempraktekan ilmu yang didapat pada pasca bencana di wilayah masing-masing, khususnya dalam pendampingan psikososial.

2. Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

2.1 Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana

Pemulihan rekonstruksi pasca bencana sebanyak 1 (satu) unit pada tahun ini berupa Dokumen Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) sebagai dasar penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Alih kegiatan menjadi Dokumen Jitupasna dikarenakan refocusing sehingga kegiatan yang semestinya dilakukann oleh Tim Jitupasna di tribulan 1 dan 2 dilaksanakan pada tribulan 3 dan 4. Proses penyusunan dilakukan secara daring dengan anggota tim Jitupasna dari

Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini dominan dari Dinas Koperasi dan UMKM Karena materi yang dibahas pada Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai kelanjutan Dokumen Jitupasna adalah berkelanjutan UKM daerah terdampak bencana non alam Covid 19.

Pelaksanaan Jitupasna diperoleh dari penilaian kerusakan dan kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan meningkatnya risiko untuk selanjutnya dijadikan dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Covid-19. Untuk itu maka basisnya diambil sampling dari 3 dalam 3 daerah subsektor wilayah pengembangan di Kabupaten Malang yaitu Desa yaitu Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, dan Desa Bedali Kecamatan Lawang. Hal ini dilakukan mengingat luasan akibat dan dampak Covid-19 meliputi seluruh daerah di Kabupaten Malang. Maka berdasarkan pertimbangan cukup di ambil 3 Desa dalam 3 daerah sub sektor wilayah pengembangan tersebut, yang mana Kabupaten Malang memiliki 6 daerah subsektor wilayah pengembangan. Ini dilakukan karena luasan akibat dan dampak bencana ini sangat luas di satu sisi pemulihan pasca bencana wajib menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran prioritas pemulihan pasca bencana.

## 2.2 Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Keterbatasan proses pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sedianya penyusunan dilakukan secara tatap muka antara BPBD, perangkat daerah terkait dan fasilitator serta konsultan, dikarenakan pandemi Covid-19 oleh karena itu pertemuan dilakukan secara daring, penyusunan dokumen melalui proses penggalan data di lapangan dengan secara daring.

## 2.3 SDM Pengelola Data Kebencanaan untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sumber daya manusia pengelola data kebencanaan untuk pengurangan resiko bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sejumlah 20 orang yaitu operator website desa selaku pengelola data kebencanaan dan Dinas Kominfo Kabupaten Malang dalam rangka rapat koordinasi pendahuluan

sebagai penyedia data dasar untuk data kebencanaan. Guna memaksimalkan website desa dalam penyusunan dan penyediaan basis data kebencanaan dalam pengurangan resiko bencana.

#### 2.4 SDM Paham Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA).

Kegiatan dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi tim kajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) pada bulan Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 40 orang terdiri dari beberapa pejabat struktural BPBD dan staf, Bappeda, Dinas Kesehatan, PU Bina Marga, PU SDA, DPKPCK, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Kelautan serta para operator SID dari desa-desa yang telah mendapat pelatihan Sistem Infomasi Desa sebagai data kebencanaan. Kegiatan diharapkan pada saat bencana dan pasca bencana, Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana paham tentang proses penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana. Selain itu juga pengadaan rompi untuk personil *check point* pada fase pembatasan social berskala besar (PSBB) Kabupaten Malang.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggungan Bencana, Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan baik dalam

bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan membuat sarana informasi berbasis teknologi informasi yang menjangkau semua lini sektor dan seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dalam penanggulangan bencana di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
  - k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
  - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

- f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
  - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana :
  - a. Kegiatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana;
  - b. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik Dan Peralatan Bencana;
- 7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
  - b. Kegiatan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana;
  - c. Kegiatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
- 8. Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca Bencana :
  - a. Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana;
  - b. Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekontruksi Pasca Bencana;

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk :

- a. Peningkatan Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- b. Umpan Balik Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Kegiatan Rencana Pengurangan Resiko Bencana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana, Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 + 8		11=10/65x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					53.584.045.243,00		0		9.439.720.259,00		89.193.327,00	52,33	36,96		1.489.193.327,00	1,51	,51	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	32.265.975.894,00	0%	0	100%	4.814.381.782,00	50%	2.122.857.452,00	50	44,09	50%	2.122.857.452,00	50	6,58	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	580.328.814,00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	20.972.200,00	5 Dokumen	3.338.400,00	62,5	39,76	5 Dokumen	3.338.400,00	62,5	1,44	
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	8 Buku	580.328.814,00	0 Buku	0	8 Buku	20.972.200,00	5 Buku	3.338.400,00	62,5	39,76	5 Buku	3.338.400,00	62,5	1,44	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	26.386.611.124,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	4.126.296.101,00	1 Dokumen	1.835.068.491,00	33,33	44,47	1 Dokumen	1.835.068.491,00	33,33	6,95	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	12 Bulan	19.017.285.714,00	0 Bulan	0	14 Bulan	2.902.932.429,00	7 Bulan	1.282.584.128,00	50	44,18	7 Bulan	1.282.584.128,00	58,33	6,74	
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Iuran BPJS	0 OB	0	0 OB	0	34 OB	58.307.172,00	34 OB	24.496.663,00	100	42,01	34 OB	24.496.663,00	0	0	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 + 8		11=10/65x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	0 OB	0	0 OB	0	20 OB	241.368.000,00	20 OB	72.617.000,00	100	30,09	20 OB	72.617.000,00	0	0	
			Jumlah Pengelola BMD	0 OB	0	0 OB	0	2 OB	8.900.000,00	2 OB	5.300.000,00	100	33,33	2 OB	5.300.000,00	0	0	
			Jumlah Tenaga Administrasi	0 OB	0	0 OB	0	32 OB	396.400.000,00	32 OB	145.900.000,00	100	19,74	32 OB	145.900.000,00	0	0	
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu tahun	12 OB	7.180.592.246,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	
			Jumlah Petugas Kebersihan dalam satu tahun	1 OB	144.000.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	
	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir	1 Buku	25.343.375,00	0 Buku	0	1 Buku	5.068.500,00	0 Buku	1.294.900,00	0	25,55	0 Buku	1.294.900,00	0	5,11	
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	1 Buku	19.389.789,00	0 Buku	0	1 Buku	3.320.000,00	0 Buku	1.875.800,00	0	56,5	0 Buku	1.875.800,00	0	9,67	
	<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>463.096.255,00</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>20.009.000,00</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>25,61</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1,11</b>	
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang disediakan	80 Stel	389.835.055,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	20 Orang	73.261.200,00	0 Orang	0	5 Orang	20.009.000,00	5 Orang	5.125.000,00	120	25,61	5 Orang	5.125.000,00	30	7	
	<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>2.192.489.518,00</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>288.144.481,00</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>132.213.000,00</b>	<b>0</b>	<b>45,88</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>132.213.000,00</b>	<b>0</b>	<b>6,03</b>	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 + 8		11=10/65x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	7 Jenis	30.262.068,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	51 Jenis	340.522.284,00	0 Jenis	0	3 Jenis	4.763.000,00	11 Jenis	2.248.000,00	137,5	47,2	11 Jenis	2.248.000,00	21,57	0,66	
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Jenis	152.069.734,00	0 Jenis	0	11 Jenis	21.777.000,00	7 Jenis	5.961.000,00	63,64	27,37	7 Jenis	5.961.000,00	63,64	3,92	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	15 Jenis	302.827.188,00	0 Jenis	0	3 Jenis	20.612.481,00	3 Jenis	10.000.000,00	100	48,51	3 Jenis	10.000.000,00	20	3,3	
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Jenis	46.154.556,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	
	1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	1060 Pack	217.920.000,00	0 Pack	0	1060 Pack	50.367.000,00	180 Pack	5.030.000,00	16,98	9,99	180 Pack	5.030.000,00	16,98	2,77	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	34 Orang	520.033.956,00	0 Orang	0	35 Orang	101.560.000,00	35 Orang	50.599.000,00	100	59,67	35 Orang	50.599.000,00	102,94	9,77	
			Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan ke Dalam Daerah	53 Orang	482.699.732,00	0 Orang	0	55 Orang	79.065.000,00	55 Orang	47.375.000,00	100	59,92	55 Orang	47.375.000,00	103,77	9,81	
	<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>599.731.020,00</b>	<b>0 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>32.200.000,00</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>24.961.461,00</b>	<b>50</b>	<b>30,37</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>24.961.461,00</b>	<b>50</b>	<b>4,16</b>	
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang disediakan	2625 Surat	45.788.250,00	0 Surat	0	0 Surat	0	0 Surat	0	0	0	0 Surat	0	0	0	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 + 8		11=10/65x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	4 Rekening	553.942.770,00	0 Rekening	0	3 Rekening	32.200.000,00	3 Rekening	24.961.461,00	100	30,37	3 Rekening	24.961.461,00	75	4,51	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	2.043.719.163,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	276.760.000,00	0 Dokumen	117.151.100,00	0	42,33	0 Dokumen	117.151.100,00	0	5,73	
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang di Pelihara Rutin dan Berkala	17 Unit	1.916.659.822,00	0 Unit	0	27 Unit	266.920.000,00	21 Unit	14.916.100,00	77,78	3,05	21 Unit	14.916.100,00	123,53	6	
	1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Jenis	37.180.059,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	14 Jenis	29.805.098,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	
	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	1.386.012,00	0 Unit	0	5 Unit	1.865.000,00	2 Unit	785.000,00	40	12,09	2 Unit	785.000,00	200	6,89	
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit	8.688.172,00	0 Unit	0	11 Unit	7.975.000,00	2 Unit	1.450.000,00	18,18	18,18	2 Unit	1.450.000,00	40	2,98	
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Mitigasi dan Pengendalian Bencana secara terpadu	100%	21.318.069.349,00	0%	0	100%	4.625.338.477,00	30%	1.366.335.875,00	30	29,54	30%	1.366.335.875,00	30	6,41	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 + 8		11=10/65x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	50 Kegiatan	1.280.269.996,00	0 Kegiatan	0	50 Kegiatan	60.757.200,00	18 Kegiatan	26.515.000,00	36	43,64	18 Kegiatan	26.515.000,00	36	2,07	
	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Rumusan Kegiatan Hasil Forum Peringkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	5 Dokumen	879.555.652,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	265.864.895,00	0 Wilayah	0	33 Wilayah	51.005.200,00	14 Wilayah	16.763.000,00	42,42	32,87	14 Wilayah	16.763.000,00	42,42	6,31	
			Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	16 Sekolah	134.849.449,00	0 Sekolah	0	16 Sekolah	9.752.000,00	2 Sekolah	9.752.000,00	12,5	100	2 Sekolah	9.752.000,00	12,5	7,23	1. SDN Sukonolo Kecamatan Bululawang 2. SDN 02 Lumbangsari Kecamatan Bululawang
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen	8.465.694.676,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.189.767.700,00	0 Dokumen	407.269.300,00	0	18,6	0 Dokumen	407.269.300,00	0	4,81	
	1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	5 Dokumen	897.011.964,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	74.080.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	10 Sekolah/Madrasah	241.396.875,00	0 Sekolah/Madrasah	0	2 Sekolah/Madrasah	9.752.000,00	2 Sekolah/Madrasah	9.752.000,00	100	100	2 Sekolah/Madrasah	9.752.000,00	20	4,04	1. MTSN 1 Malang di Kecamatan Gondanglegi 2. SMA Wahidiyah Bululawang
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	1 Tim	252.384.834,00	0 Tim	0	0 Tim	0	0 Tim	0	0	0	0	0 Tim	0	0	
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	250 Paket	387.225.404,00	0 Paket	0	50 Paket	250.000.000,00	0 Paket	5.300.000,00	0	2,12	0 Paket	5.300.000,00	0	1,37	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 + 8		11=10/65x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB	5 Dokumen	799.731.292,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	82.455.800,00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0		
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana	15 Desa	1.180.430.142,00	0 Desa	0	14 Desa	890.128.000,00	4 Desa	220.606.000,00	28,57	24,78	4 Desa	220.606.000,00	26,67	18,69	1. Desa Madiredo Kec. Pujon 2. Desa Sukoanyar Kec. Wajak 3. Desa Gubugklakah Kec. Poncokusumo 4. Desa Duwet Kec. Tumpang	
	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	10 Dokumen	993.953.016,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	170.622.900,00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0		
			Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Kegiatan	470.599.423,00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	179.277.600,00	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0		
			Jumlah SDM Paham JITUPASNA	30 Orang	892.919.716,00	0 Orang	0	90 Orang	195.942.600,00	90 Orang	89.547.600,00	100	45,7	90 Orang	89.547.600,00	300	10,03	-	
			Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	376.031.424,00	0 Orang	0	30 Orang	90.107.100,00	0 Orang	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	-
			Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	608.245.008,00	0 Orang	0	40 Orang	106.729.700,00	40 Orang	65.634.700,00	100	61,5	40 Orang	65.634.700,00	100	10,79		
			Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan	566.321.286,00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	107.845.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0		
	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 Tim	799.444.292,00	0 Tim	0	0 Tim	0	0 Tim	0	0	0	0	0 Tim	0	0		
	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang Terlaksana	0 Kali	0	0 Kali	0	2 Kali	32.827.000,00	1 Kali	16.429.000,00	50	50,05	1 Kali	16.429.000,00	0	0		

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 + 8		11=10/65x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan Penanganan Darurat/Pemulihan Awal Akibat Bencana.	2 Laporan	9.133.725.906,00	0 Laporan	0	2 Laporan	2.374.813.577,00	1 Laporan	932.551.575,00	50	39,27	1 Laporan	932.551.575,00	50	10,21	
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	71 Kali	6.616.626.472,00	0 Kali	0	71 Kali	1.999.999.700,00	47 Kali	823.001.275,00	66,2	41,15	47 Kali	823.001.275,00	66,2	12,44	-
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	2.517.099.434,00	0 Paket	0	600 Paket	374.813.877,00	300 Paket	109.550.300,00	50	29,23	300 Paket	109.550.300,00	50	4,35	300 Paket Sembako
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	0 Laporan	2.438.378.771,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0	0 Laporan	0	0	0
	1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	40 Orang	1.068.564.664,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	
			Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50 Orang	404.911.600,00	0 Orang	0	50 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	
			Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40 Orang	964.902.507,00	0 Orang	0	40 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												40,00	36,82			40,00	6,49	
Predikat Kinerja Kegiatan Total												SR	SR			SR	SR	

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Malang belum sepenuhnya 100%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang sebagai supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Malang. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten Malang yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Malang baru memiliki Perda No. 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Malang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Malang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017, Keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2020 sebagai berikut :

- 1 Pada Indikator Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target 81,3%, tercapai 81,3% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (33 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 100% keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Pencegahan Dalam

Menghadapi Bencana dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.

- 2 Pada Indikator Persentase Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Diselamatkan dengan target 85%, tercapai 85% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 119 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 119 kejadian) Capaian 100% keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar logistik dan Peralatan Bencana.
- 3 Pada Indikator Persentase Fasilitas Umum dan Sarana Prasarana yang Berhasil dioperasikan dengan target 100% tercapai 100%, keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana dan Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)			2600 Buah	2625 Buah	-	-	2525 surat	-	-	-	
2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)			36 Rekening	36 Rekening	-	-	36 Rekening	-	-	-	
3	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			22 OB	22 OB	-	-	44 OB	-	-	-	
4	Jumlah petugas kebersihan (OB)			1 OB	1 OB	-	-	0 OB	-	-	-	
5	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			51 Jenis	51 Jenis	-	-	52 Jenis	-	-	-	
6	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)			12 Jenis	12 Jenis	-	-	11 Jenis	-	-	-	
7	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			7 Jenis	7 Jenis	-	-	7 Jenis	-	-	-	
8	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)			3 Jenis	3 Jenis	-	-	3 jenis	-	-	-	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			1060 Pack	1060 Pack	-	-	490 Pack	-	-	-	
10	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)			34 HOK	34 HOK	-	-	10 HOK	-	-	-	
11	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			34 Orang	34 Orang	-	-	33 Orang	-	-	-	
12	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)			17 Jenis	17 Jenis	-	-	0 Jenis	-	-	-	
13	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)			10 Unit	10 Unit	-	-	16 Unit	-	-	-	
14	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)			7 Unit	7 Unit	-	-	24 Unit	-	-	-	
15	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)			3 Jenis	3 Jenis	-	-	0 Jenis	-	-	-	
16	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)			8 Jenis	8 Jenis	-	-	2 Jenis	-	-	-	
17	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)			16 Jenis	16 Jenis	-	-	16 Jenis	-	-	-	
18	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			5 Unit	5 Unit	-	-	5 Unit	-	-	-	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			1 Jenis	1 Jenis	-	-	1 Jenis	-	-	-	
20	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			3 Jenis	3 Jenis	-	-	2 Jenis	-	-	-	
21	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)			80 Stel	80 Stel	-	-	0 Stel	-	-	-	
22	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)			13 Orang	13 Orang	-	-	0 Orang	-	-	-	
23	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)			8 Buku	8 Buku	-	-	12 Buku	-	-	-	
24	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)			1 Buku	1 Buku	-	-	1 Buku	-	-	-	
25	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)			1 Buku	1 Buku	-	-	1 Buku	-	-	-	
26	Jumlah Dokumen Laporan Hasil SKM Pelayanan Kebencanaan			0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	-	-	-	
27	Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan			1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	-	-	-	
28	Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)			25 Sekolah	25 Sekolah	-	-	7 Sekolah	-	-	-	
29	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana			1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	-	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana			33 Wilayah	33 Wilayah	-	-	57 Wilayah	-	-	-	
31	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana			4 Sekolah/Madrasah	4 Sekolah/Madrasah	-	-	0 Sekolah/Madrasah	-	-	-	
32	Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan			50 Meter	50 Meter	-	-	0 Meter	-	-	-	
33	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Piket Kesiapsiagaan Bencana			40 Orang	40 Orang	-	-	0 Orang	-	-	-	
34	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana			175 Paket	175 Paket	-	-	60 Paket	-	-	-	
35	Jumlah Desa Tangguh Bencana			3 Desa	3 Desa	-	-	3 Desa	-	-	-	
36	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk			1 Unit	1 Unit	-	-	0 Unit	-	-	-	
37	Jumlah Penanganan Kedaruratan			51 Kali	51 Kali	-	-	66 Kali	-	-	-	
38	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando			40 Orang	40 Orang	-	-	0 Orang	-	-	-	
39	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk			1 Tim	1 Tim	-	-	0 Tim	-	-	-	
40	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana			50 Orang	50 Orang	-	-	0 Orang	-	-	-	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan			400 Paket	400 Paket	-	-	600 Paket	-	-	-	
42	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial			30 Orang	30 Orang	-	-	30 Orang	-	-	-	
43	Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana			1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	0 Dokumen	-	-	-	
44	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana			2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	0 Kegiatan	-	-	-	
45	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana			3 Unit	3 Unit	-	-	1 Unit	-	-	-	
46	Jumlah Desa Siap Kelola Data SID untuk Pengurangan Resiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi			0 Desa	0 Desa	-	-	0 Desa	-	-	-	
47	Jumlah SDM Paham JITU PASNA			30 Orang	30 Orang	-	-	30 Oorang	-	-	-	
48	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan			40 Orang	40 Orang	-	-	30 Orang	-	-	-	
49	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	-	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai tugas :

1. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap dan penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan, Menyusun dan menetapkan penyesuaian anggaran rasionalisasi dalam rangka pencegahan bencana non alam (penyebarluasan virus Pandemi covid-19);
10. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, berkoordinasi dan menginformasikan bahaya bencana non alam (virus pandemi covid-19).

Untuk melaksanakan tugas dimaksud BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

Fungsi ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah,

lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;

2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;  
Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.  
Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasikan dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;
4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian risiko bencana dan pemetaannya;

8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas; dan
11. Belum terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tersusun dan terstruktur sesuai dengan tingkat keahlian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
12. Belum tersedianya sarana prasarana dan peralatan yang memadai dengan personil yang terlatih sesuai dengan tingkat keahlian dalam penyelenggaraan pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) sebagai pusat data dan pengendalian dalam operasi BPBD;
13. Belum adanya kajian resiko, rencana aksi penanggulangan bencana non alam;
14. Belum adanya tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana non alam dalam hal ini (virus pademi covid-19).

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.
2. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan

pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Formulasi isu-isu penting yang dapat diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Merencanakan, melaksanakan, menyusun dan berkoordinasi dalam pencegahan penyebaran virus pademi covid-19 pada semua perangkat daerah, lintas lembaga, TNI, Polri, Akademisi, Pakar/Ahli, Stake Holder, pemuka agama dan semua lapisan masyarakat.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
2. Melaksanakan peraturan pemerintah tentang rasionalisasi Anggaran dalam rangka pencegahan bencana non alam (penyebarluasan virus epidemi covid-19) antara lain sebagai berikut :
  - a. Program dan kegiatan operasional masih dipertahankan dan tidak banyak dilaksanakan rasionalisasi dikarenakan sebagai pendukung operasional kegiatan pencegahan bencana non alam (penyebarluasan virus epidemi covid-19);
  - b. Melaksanakan penyesuaian pagu anggaran prioritas terhadap program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
  - c. Melaksanakan pergeseran pagu anggaran program dan kegiatan yang tidak mencukupi ke program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana non alam.

3. Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk program dan kegiatan bencana alam dan bencana non alam (dalam hal ini dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran virus epidemi covid-19) antara lain sebagai berikut :
  - a. Pengembangan sistem penanggulangan bencana;
  - b. Pemenuhan kebutuhan dasar logistik dan peralatan bencana bencana;
  - c. Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana;
  - d. Pengurangan resiko bencana;
  - e. Desa Tangguh bencana;
  - f. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - g. Mitigasi struktural;
  - h. Pendampingan psikososial;
  - i. Rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi;
  - j. Jitupasna.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Malang**

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100	%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100	%		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8	Dokumen	95.042.788	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8	Dokumen	95.042.788	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	BPBD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	8	Dokumen	95.042.788	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	BPBD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	8	Dokumen	95.042.788	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100	%	4.252.575.009	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100	%	4.252.575.009	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	12	Bulan	2.914.172.757	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	12	Bulan	2.914.172.757	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi dan Tugas ASN	BPBD	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	12	OB	1.330.748.952	Penyediaan Administrasi dan Tugas ASN	BPBD	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	12	OB	1.330.748.952	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1	Dokumen	4.477.300	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1	Dokumen	4.477.300	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	1	Dokumen	3.176.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	1	Dokumen	3.176.000	
1.05.01.2.05	<b>Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	BPBD	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100	%	<b>75.854.000</b>	<b>Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	BPBD	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100	%	<b>75.854.000</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80	Stel	63.854.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80	Stel	63.854.000	
1.05.01.2.06	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	20	Orang	12.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	20	Orang	12.000.000	
1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	BPBD	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100	%	<b>448.447.200</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	BPBD	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100	%	<b>448.447.200</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	7	Jenis	6.033.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	7	Jenis	6.033.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah Alat-alat Listrik Kantor	51	Jenis	141.257.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah Alat-alat Listrik Kantor	51	Jenis	141.257.700	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			yang disediakan				yang disediakan				
		BPBD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11	Unit		BPBD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11	Unit	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15	Jenis	47.684.500	BPBD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15	Jenis	47.684.500
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPBD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	3	Jenis	7.560.000	BPBD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3	Jenis	7.560.000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1060	Pack	35.510.000	BPBD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1060	Pack	35.510.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	34	HOK	140.112.000	BPBD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34	HOK	140.112.000
		BPBD	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Ke Dalam Daerah	53	HOK	70.290.000	BPBD	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Ke Dalam Daerah	53	HOK	70.290.000
1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BPBD	<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	100	%	<b>88.200.000</b>	BPBD	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	%	<b>88.200.000</b>
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2625	OK	7.500.000	BPBD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2625	OK	7.500.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4	Rekening	80.700.000	BPBD	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4	Rekening	80.700.000

No.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100	%	318.032.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100	%	318.032.000	
1.05.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	BPBD	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	17	Unit	297.220.000	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	BPBD	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	17	Unit	297.220.000	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	BPBD	Jumlah mebel yang dipelihara	3	Jenis	6.090.000	Pemeliharaan Mebel	BPBD	Jumlah mebel yang dipelihara	3	Jenis	6.090.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	14	Jenis	4.882.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	14	Jenis	4.882.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1	Jenis	9.840.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1	Jenis	9.840.000	
		BPBD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5	Unit			BPBD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5	Unit		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	95	%	3.577.754.400	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	95	%	3.577.754.400	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana			209.705.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana			209.705.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Dokumen rumusan kegiatan hasil forum Perangkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	1	Dokumen	144.069.000	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Dokumen rumusan kegiatan hasil forum Perangkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	1	Dokumen	144.069.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana	BPBD	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33	Wilayah	43.548.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana	BPBD	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33	Wilayah	43.548.000	
		BPBD	Jumlah Sosialisasi Pengendalian Bencana di Sekolah (Pena Sekolah)	16	Sekolah	22.088.000		BPBD	Jumlah Sosialisasi Pengendalian Bencana di Sekolah (Pena Sekolah)	16	Sekolah	22.088.000	
1.05.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	BPBD	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana		Dokumen	<b>1.341.672.100</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	BPBD	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana		Dokumen	<b>1.341.672.100</b>	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	1	Dokumen	146.928.300	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	1	Dokumen	146.928.300	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	2	Sekolah	39.540.200	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	2	Sekolah	39.540.200	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	1	Unit	41.340.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	1	Unit	41.340.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	50	Paket	67.202.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	50	Paket	67.202.000	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan	50	Meter	127.068.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan	50	Meter	127.068.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3	Desa	193.502.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3	Desa	193.502.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Aksi	2	Dokumen	162.807.000	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Rencana Aksi	2	Dokumen	162.807.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Rehabilitasi dan Rekontruksi					Rehabilitasi dan Rekontruksi				
		BPBD	Jumlah Pemulihan Rekontruksi Pasca Bencana	1	Kegiatan	77.083.000		BPBD	Jumlah Pemulihan Rekontruksi Pasca Bencana	1	Kegiatan	77.083.000
		BPBD	Jumlah SDM Paham Jitu Pasna	30	Orang	146.258.000		BPBD	Jumlah SDM Paham Jitu Pasna	30	Orang	146.258.000
		BPBD	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30	Orang	61.593.000		BPBD	Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30	Orang	61.593.000
		BPBD	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40	Orang	99.629.000		BPBD	Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40	Orang	99.629.000
		BPBD	Jumlah Dokumen Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2	Kegiatan	92.762.000		BPBD	Jumlah Dokumen Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2	Kegiatan	92.762.000
1.05.03.2.02.08	Pengembang Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	1	Dokumen	85.959.600	Pengembang Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	1	Dokumen	85.959.600
1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	BPBD	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan <b>penanganan</b> darurat /pemulihan awal akibat <b>bencana.</b>		Laporan	<b>1.626.977.000</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	BPBD	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan <b>penanganan</b> darurat /pemulihan awal akibat <b>bencana.</b>		Laporan	<b>1.626.977.000</b>
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	71	Kali	1.000.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	71	Kali	1.000.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	BPBD	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600	Paket	626.977.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	BPBD	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600	Paket	626.977.000
1.05.03.2.04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	BPBD	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturn Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah			<b>399.400.300</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	BPBD	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturn Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah			<b>399.400.300</b>

No.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	40	Orang	175.028.200	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	40	Orang	175.028.200	
		BPBD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50	Orang	66.323.500		BPBD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50	Orang	66.323.500	
		BPBD	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40	Orang	158.048.600		BPBD	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40	Orang	158.048.600	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2023 .

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku**  
**Keperentingan Tahun 2022**

NO.	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	VOLUME		PERMASALAHAN	ALAMAT	CATATAN
1	2	3	4	5		6	7	8
1	JIRAN		Pengadaan Rambu-rambu Jalur Evakuasi Daerah Rawan Bencana	1 Unit	40.000.000		Jl Trisula No. 80 Dusun Krajan Kulon RT 05 RW 01, Kab. Malang, Donomulyo, Purworejo	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
2	SUPARMAN		Pembentukan dan Pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana di Desa	30 Orang	70.000.000		Desa Mentaraman, Kab. Malang, Donomulyo, Mentaraman	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
3	SUMARNO		Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000		Desa Lebakharjo, Kab. Malang, Ampelgading, Lebakharjo	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
4	MUJIANTO MR		Pengadaan Rambu-rambu Jalur Evakuasi Daerah Rawan Bencana	50 Unit	70.000.000		Jl Raya Ngadas RT 04 RW 01, Kec. Pincokusumo 65157, Kab. Malang, Pincokusumo, Ngadas	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
5	H. HASAN ASYARI		Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000		Kantor Desa Gondanglegi Kulon, Kab. Malang, Gondanglegi, Gondanglegi Kulon	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
6	JAMBURI		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	2 Set	70.922.000		Jl Raya No 30 RT 12 RW 2, Kab. Malang, Kepanjen, Sengguruh	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
7	DIDIT MULYO SANTOSO		Pengadaan Rambu-rambu Jalur Evakuasi Daerah Rawan Bencana	50 Unit	68.327.000		Desa Jatirejoyoso, Kab. Malang, Kepanjen, Jatirejoyoso	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
8	TIMBANG		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	36 Jenis	70.922.000		Desa Duwet Krajan, Kab. Malang, Tumpang, Duwet Krajan	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah

NO.	PENGUSUL	URUSAN	USULAN	VOLUME		PERMASALAHAN	ALAMAT	CATATAN
1	2	3	4	5		6	7	8
9	SULKAN		Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000		Desa Pucangsongo, Kab. Malang, Pakis, Pucangsongo	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
10	ABDUL KARIM		Pembentukan dan Pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana di Desa	30 Orang	61.634.000		Desa Kucur, Kab. Malang, Dau, Kucur	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
11	SUPRIADI		Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000		Desa Petungsewu RT 06 RW 02, Kab. Malang, Dau, Petungsewu	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
12	DEWI BUYATI		Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000		Dusun Krajan, Kab. Malang, Lawang, Bedali	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
13	MURTADJI		Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	61.384.000		Jl Sumbersuko No 1, Kab. Malang, Lawang	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
14	UDI HARTOKO		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	36 Jenis	70.922.000		Dusun Krajan RT 003 RW 002, Kab. Malang, Pujon, Pujon Kidul	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah
15	AGUS SUPRIADI		Pelatihan Kedaruratan Penanganan Bencana (Sistem Komando)	30 Orang	60.000.000		Desa Ampelgading, Kab. Malang, Tirtoyudo, Ampelgading	Untuk diproses ke Forum Perangkat Daerah

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

**Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik**, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;**
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

**Sasaran :**

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi BNPB adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;

5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Disaster Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPB adalah :

1. Program Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana;  
dengan kegiatan :

- a. Mitigasi Struktural;
  - b. Mitigasi Non Struktural;
  - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
  - d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
2. Program Penanganan Darurat Bencana;
- dengan kegiatan :
- a. Tanggap darurat di daerah terkena bencana;
  - b. Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana;
  - c. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana;
  - d. Penanganan pengungsi akibat bencana.
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- dengan kegiatan :
- a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;
  - b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana;
  - c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana.
4. Program Peralatan dan logistik;
- dengan kegiatan :
- a. Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana;
  - b. Penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana.
5. Program Data, Informasi dan Humas.
- dengan kegiatan :
- a. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

#### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif

### 3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasarana dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan indikator :

1. Persentase jumlah korban bencana yang berhasil diselamatkan;
2. Persentase fasilitas umum dan sarana prasarana yang berhasil dioperasikan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;

2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penanggulangan Bencana :
  - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
  - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana terutama untuk perempuan, dimana Perempuan dan laki-laki

memiliki peran sosial yang berbeda. Peran sosial yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Badan Penanggulangan Daerah**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				Tolok Ukur	target	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun ( % )			BPBD Kab.Malang	100%				APBD		<b>Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)</b>	100%	
1.05.01.2.01	<b>Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu		BPBD Kab.Malang		8 Dokumen		<b>95,042,788</b>	APBD		Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	95,042,788
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Aturan dan Tepat Waktu	BPBD Kab.Malang			8 Dokumen	95,042,788	APBD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat	8 Dokumen	95,042,788



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				Tolok Ukur	target	
1.05.01.2.05	<b>Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	BPBD Kab.Malang		100%			<b>75,854,000</b>	APBD		Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	75,854,000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	BPBD Kab.Malang			80 Stel		63,854,000	APBD		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80 Stel	63,854,000
1.05.01.2.06	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	BPBD Kab.Malang			20 Orang		12,000,000	APBD		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	20 Orang	12,000,000
1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	BPBD Kab.Malang		100%			<b>448,447,200</b>	APBD		Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	448,447,200

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				Tolok Ukur	target	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan yang disediakan	BPBD Kab.Malang			7 Jenis	6,033,000	APBD		Jumlah komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan yang disediakan	7 Jenis	6,033,000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Alat- alat Listrik Kantor yang disediakan	BPBD Kab.Malang			51 Jenis	141,257,700	APBD		Jumlah Alat-alat Listrik Kantor yang disediakan	51 Jenis	141,257,700
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPBD Kab.Malang			11 Unit	APBD		Jumlah Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang disediakan	11 Unit			
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPBD Kab.Malang			15 Jenis	47,684,500	APBD		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Jenis	47,684,500
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	BPBD Kab.Malang			3 Jenis	7,560,000	APBD		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	3 Jenis	7,560,000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan TamU			Jumlah fasilitas kunjungan tamU yang disediakan	BPBD Kab.Malang			1060 Pack	35,510,000	APBD		Jumlah fasilitas kunjungan tamU yang disediakan	1060 Pack	35,510,000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan			Jumlah	BPBD			34 HOK	140,112,000	APBD		Jumlah	34 HOK	140,112,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				Tolok Ukur	target		
															7
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	Kab.Malang								Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah		
				Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Ke Dalam Daerah	BPBD Kab.Malang			53 HOK	70,290,000	APBD			Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Ke Dalam Daerah	53 HOK	70,290,000
1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>		BPBD Kab.Malang			100%	<b>88,200,000</b>	APBD			<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradminis- tasi dengan benar</b>	100%	88,200,000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	BPBD Kab.Malang			2625 OK	7,500,000	APBD			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2625 OK	7,500,000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	BPBD Kab.Malang			4 Rekening	80,700,000	APBD			Jumlah rekening jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4 Rekening	80,700,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				Tolok Ukur	target	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		BPBD Kab.Malang		100%		318,032,000	APBD		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	318,032,000
1.05.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	BPBD Kab.Malang				297,220,000	APBD		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	17 Unit	297,220,000
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah mebel yang dipelihara	BPBD Kab.Malang				6,090,000	APBD		Jumlah mebel yang dipelihara	3 Jenis	6,090,000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	BPBD Kab.Malang				4,882,000	APBD		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	14 Jenis	4,882,000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	BPBD Kab.Malang				9,840,000	APBD		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Jenis	9,840,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			Tolok Ukur		target		
														7	
				Rutin/Berkala									Rutin/Berkala		
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	BPBD Kab.Malang			5 Unit		APBD			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit	-
1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu</b>			BPBD Kab.Malang	95%			<b>3,577,754,400</b>	APBD			<b>Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu</b>	96%	3,577,754,400
1.05.03.2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	BPBD Kab.Malang					<b>209,705,000</b>	APBD			Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		209,705,000
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen rumusan kegiatan hasil forum Perangkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen		144,069,000	APBD			Dokumen rumusan kegiatan hasil forum Perangkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	1 Dokumen	144,069,000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana		Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	BPBD Kab.Malang			33 Wilayah		43,548,000	APBD			Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	43,548,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				Tolok Ukur	target	
				Jumlah Sosialisasi Pengendalian Bencana di Sekolah (Pena Sekolah)	BPBD Kab.Malang			16 Sekolah	22,088,000	APBD		Jumlah Sosialisasi Pengendalian Bencana di Sekolah (Pena Sekolah)	16 Sekolah	22,088,000
1.05.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	BPBD Kab.Malang					<b>1,341,672,100</b>	APBD		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana		1,341,672,100
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	146,928,300	APBD			Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	1 Dokumen	146,928,300
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	BPBD Kab.Malang			2 Sekolah	39,540,200	APBD			Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	2 Sekolah	39,540,200
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	BPBD Kab.Malang			1 Unit	41,340,000	APBD			Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	1 Unit	41,340,000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD Kab.Malang			50 Paket	67,202,000	APBD			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	50 Paket	67,202,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				Tolok Ukur	target	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan	BPBD Kab.Malang			50 Meter	127,068,000	APBD		Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan	50 Meter	127,068,000
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD Kab.Malang			3 Desa	193,502,000	APBD		Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	193,502,000
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	BPBD Kab.Malang			2 Dokumen	162,807,000	APBD		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	2 Dokumen	162,807,000
				Jumlah Pemulihan Rekontruksi Pasca Bencana	BPBD Kab.Malang			1 Kegiatan	77,083,000	APBD		Jumlah Pemulihan Rekontruksi Pasca Bencana	1 Kegiatan	77,083,000
				Jumlah SDM Paham Jitu Pasna	BPBD Kab.Malang			30 Orang	146,258,000	APBD		Jumlah SDM Paham Jitu Pasna	30 Orang	146,258,000
				Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	BPBD Kab.Malang			30 Orang	61,593,000	APBD		Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	61,593,000
				Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	BPBD Kab.Malang			40 Orang	99,629,000	APBD		Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	99,629,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				Tolok Ukur	target	
				Jumlah Dokumen Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	BPBD Kab.Malang			2 Kegiatan	92,762,000	APBD		Jumlah Dokumen Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan	92,762,000
1.05.03.2.02.08	Pengembang Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	85,959,600	APBD		Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 Dokumen	85,959,600
1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	BPBD Kab.Malang					<b>1,626,977,000</b>	APBD		Jumlah Pelayanan Penyelamat an, Bantuan Logistik dan <b>penangan an</b> darurat /pemulihan awal akibat <b>bencana.</b>		1,626,977,000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Penangan Kedaruratan (DSP)	BPBD Kab.Malang			71 Kali	1,000,000,000	APBD		Jumlah Penangan an Kedarurata n (DSP)	71 Kali	1,000,000,000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota			Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	BPBD Kab.Malang			600 Paket	626,977,000	APBD		Jumlah Ketersediaa n Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaa n	600 Paket	626,977,000
1.05.03.2.04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		Jumlah Sistem Dasar Penanggula n Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur	BPBD Kab.Malang					<b>399,400,300</b>	APBD		Jumlah Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana kepada aparatur Pemerintah		399,400,300

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				Tolok Ukur	target	
			Daerah									Daerah dan Aparatur Daerah		
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulan Bencana	BPBD Kab.Malang			40 Orang	175,028,200	APBD		Jumlah Peningkata n Aparatur Daerah Dalam Penanggula ngan Bencana	40 Orang	175,028,200
				Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	BPBD Kab.Malang			50 Orang	66,323,500	APBD		Jumlah Peningkata n Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50 Orang	66,323,500
				Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	BPBD Kab.Malang			40 Orang	158,048,600	APBD		Jumlah Peningkata n Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40 Orang	158,048,600

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;

2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penanggulangan Bencana :
  - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
  - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko

bencana terutama untuk perempuan dimana Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial yang dikonstruksikan secara berbeda, peran sosial yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023**

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023				Keterangan			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	05	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Dukungan Menejemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun ( % )				BPBD Kab.Malang	100%				APBD	
1	05	01	2.01		<b>Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu			BPBD Kab.Malang		8 Dokumen		<b>95.042.788</b>	APBD	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja yang disusun sesuai Aturan dan Tepat Waktu		BPBD Kab.Malang			8 Dokumen	95.042.788	APBD	
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun			BPBD Kab.Malang		100%		<b>4.252.575.009</b>	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023				Keterangan		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						sesuai aturan dan tepat waktu								
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	BPBD Kab.Malang			12 Bulan	2.914.172.757	APBD
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi dan Tugas ASN			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	BPBD Kab.Malang			12 OB	1.330.748.952	APBD
1	05	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	4.477.300	APBD
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	3.176.000	APBD
1	05	01	2.05		<b>Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		BPBD Kab.Malang		100%		<b>75.854.000</b>	APBD
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	BPBD Kab.Malang			80 Stel	63.854.000	APBD

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023				Keterangan		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	BPBD Kab.Malang			20 Orang	12.000.000	APBD	
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		BPBD Kab.Malang		100%		<b>448.447.200</b>	APBD	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	BPBD Kab.Malang			7 Jenis	6.033.000	APBD	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Alat-alat Listrik Kantor yang disediakan	BPBD Kab.Malang			51 Jenis	141.257.700	APBD	
							Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPBD Kab.Malang				11 Unit		APBD	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	BPBD Kab.Malang			15 Jenis	47.684.500	APBD	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	BPBD Kab.Malang			3 Jenis	7.560.000	APBD	

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023				Keterangan		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	BPBD Kab.Malang			1060 Pack	35.510.000	APBD	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	BPBD Kab.Malang			34 HOK	140.112.000	APBD	
								Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Ke Dalam Daerah	BPBD Kab.Malang			53 HOK	70.290.000	APBD	
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	BPBD Kab.Malang		100%		<b>88.200.000</b>	APBD	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	BPBD Kab.Malang			2625 OK	7.500.000	APBD	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	BPBD Kab.Malang			4 Rekening	80.700.000	APBD	
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun</b>	BPBD Kab.Malang		100%		<b>318.032.000</b>	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023				Keterangan		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar								
1	05	01	2.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	BPBD Kab.Malang			17 Unit	297.220.000	APBD
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah mebel yang dipelihara	BPBD Kab.Malang			3 Jenis	6.090.000	APBD
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	BPBD Kab.Malang			14 Jenis	4.882.000	APBD
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	BPBD Kab.Malang			1 Jenis	9.840.000	APBD
								Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	BPBD Kab.Malang			5 Unit		APBD
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu</b>			BPBD Kab.Malang	95%			<b>3.577.754.400</b>	APBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023				Keterangan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		BPBD Kab.Malang				209.705.000	APBD	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota			Dokumen rumusan kegiatan hasil forum Perangkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	144.069.000	APBD	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana			Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	BPBD Kab.Malang			33 Wilayah	43.548.000	APBD	
								Jumlah Sosialisasi Pengendalian Bencana di Sekolah (Pena Sekolah)	BPBD Kab.Malang			16 Sekolah	22.088.000	APBD	
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana		BPBD Kab.Malang				1.341.672.100	APBD	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	146.928.300	APBD	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	BPBD Kab.Malang			2 Sekolah	39.540.200	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023				Keterangan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	BPBD Kab.Malang			1 Unit	41.340.000	APBD	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD Kab.Malang			50 Paket	67.202.000	APBD	
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan	BPBD Kab.Malang			50 Meter	127.068.000	APBD	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD Kab.Malang			3 Desa	193.502.000	APBD	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Kab.Malang			2 Dokumen	162.807.000	APBD	
								Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD Kab.Malang			1 Kegiatan	77.083.000	APBD	
								Jumlah SDM Paham Jitu Pasna	BPBD Kab.Malang			30 Orang	146.258.000	APBD	
					-			Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	BPBD Kab.Malang			30 Orang	61.593.000	APBD	
								Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	BPBD Kab.Malang			40 Orang	99.629.000	APBD	
								Jumlah Dokumen Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	BPBD Kab.Malang			2 Kegiatan	92.762.000	APBD	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	85.959.600	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023				Keterangan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	05	03	2.03				Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.		BPBD Kab.Malang				1.626.977.000	APBD	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	BPBD Kab.Malang			71 Kali	1.000.000.000	APBD	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota			Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	BPBD Kab.Malang			600 Paket	626.977.000	APBD	
1	05	03	2.04				Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah		BPBD Kab.Malang				399.400.300	APBD	
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	BPBD Kab.Malang			40 Orang	175.028.200	APBD	
							Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur		BPBD Kab.Malang			50 Orang	66.323.500	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023						Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana							
				Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	BPBD Kab.Malang			40 Orang	158.048.600	APBD	

**Tabel 4.2**  
**Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan BPBD 2023**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2022						Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	I		II		III		IV		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	05 01				BPBD Kab.Malang	100%			95.042.788	APBD		1.634.400		12.808.388		20.000.000		60.600.000	
1	05 01 2.01				BPBD Kab.Malang		8 Dokumen		95.042.788	APBD	4	1.634.400	0	12.808.388	3	20.000.000	1	60.600.000	
1	05 01 2.01 06				BPBD Kab.Malang		8 Dokumen		95.042.788	APBD	4	1.634.400	0	12.808.388	3	20.000.000	1	60.600.000	
1	05 01 2.02				BPBD Kab.Malang		100%		4.252.575.009	APBD		1.062.818.673		1.062.818.679		1.063.444.175		1.063.492.477	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2022						Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	I		II		III		IV		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu																
1	05 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	BPBD Kab.Malang			12 Bulan	2.914.172.757	APBD	3	728.543.189	3	728.543.189	3	728.543.189	3	728.543.189	
1	05 01 2.02 02		Penyediaan Administrasi dan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	BPBD Kab.Malang			12 OB	1.330.748.952	APBD	3	332.687.238	3	332.687.238	3	332.687.238	3	332.687.238	
1	05 01 2.02 05		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	4.477.300	APBD	0	1.119.325	0	1.119.325	1	1.119.325	0	1.119.325	
1	05 01 2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	3.176.000	APBD	0	794.000	0	794.000	1	794.000	0	794.000	
1	05 01 2.05		<b>Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi	BPBD Kab.Malang		100%		<b>75.854.000</b>	APBD		3.000.000		3.000.000		66.854.000		3.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022					Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	I		II		III		IV		
						Program	Keluara n Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			dengan benar																
1	05 01 2.05 02			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	BPBD Kab.Malang			80 Stel	63.854.000	APBD	20		20		20			20	
1	05 01 2.05 09			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	BPBD Kab.Malang			20 Orang	12.000.000	APBD	5		5		5			5	
1	05 01 2.06			Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	BPBD Kab.Malang		100%		448.447.200	APBD		87.531.378		185.853.378		87.531.131			87.531.313
1	05 01 2.06 01			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	BPBD Kab.Malang			7 Jenis	6.033.000	APBD	2	1.508.250	2	1.508.250	2	1.508.250	1		1.508.250
1	05 01 2.06 02			Jumlah Alat-alat Listrik Kantor yang disediakan	BPBD Kab.Malang			51 Jenis	141.257.700	APBD	13	35.314.425	13	35.314.425	13	35.314.425	12		35.314.425

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022					Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	I		II		III		IV		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPBD Kab.Malang			11 Unit		APBD	3		3		3		2		
1	05 01 2.06 05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD Kab.Malang			15 Jenis	47.684.500	APBD	4	11.921.125	3	11.921.125	4	11.921.125	4	11.921.125	
1	05 01 2.06 06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Kab.Malang			3 Jenis	7.560.000	APBD	0	1.890.000	1	1.890.000	1	1.890.000	1	1.890.000	
1	05 01 2.06 08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD Kab.Malang			1060 Pack	35.510.000	APBD	265	8.877.500	265	8.877.500	265	8.877.500	265	8.877.500	
1	05 01 2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kab.Malang			34 HOK	140.112.000	APBD	8	35.028.000	8	35.028.000	9	35.028.000	9	35.028.000	
				Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Ke Dalam Daerah	BPBD Kab.Malang			53 HOK	70.290.000	APBD	13	17.572.500	13	17.572.500	13	17.572.500	14	17.572.500	
1	05 01 2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BPBD Kab.Malang			100%	<b>88.200.000</b>	APBD		22.050.000		22.050.000		22.050.000		22.050.000	
1	05 01 2.08 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kab.Malang			2625 OK	7.500.000	APBD	656	22.050.000	656	22.050.000	656	22.050.000	657	22.050.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2022						Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	I		II		III		IV		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	05 01 2.08 02			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	BPBD Kab.Malang			4 Rekening	80.700.000	APBD	1	22.050.000	1	22.050.000	1	22.050.000	1	22.050.000	
1	05 01 2.09		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>		BPBD Kab.Malang		100%		<b>318.032.000</b>	APBD		79.507.998		79.507.998		79.508.006		79.508.006	
1	05 01 2.09 02			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	BPBD Kab.Malang			17 Unit	297.220.000	APBD	4	74.305.000	4	74.305.000	5	74.305.000	4	74.305.000	
1	05 01 2.09 05			Jumlah mebel yang dipelihara	BPBD Kab.Malang			3 Jenis	6.090.000	APBD	0	1.522.500	1	1.522.500	1	1.522.500	1	1.522.500	
1	05 01 2.09 09			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	BPBD Kab.Malang			14 Jenis	4.882.000	APBD	3	1.220.500	3	1.220.500	4	1.220.500	4	1.220.500	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2022					Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	I		II		III		IV		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	BPBD Kab.Malang			1 Jenis	9.840.000	APBD		2.460.000		2.460.000	1	2.460.000		2.460.000	
								Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	BPBD Kab.Malang			5 Unit		APBD	1	-	1	-	2	-	1	-	
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu</b>			BPBD Kab.Malang	95%			<b>3.577.754.400</b>	APBD		894.438.600		894.438.600		894.438.600		894.438.600	
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		BPBD Kab.Malang				<b>209.705.000</b>	APBD		52.426.250		52.426.250		52.426.250		52.426.250	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota			Dokumen rumusan kegiatan hasil forum Perangkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	144.069.000	APBD		36.017.250		36.017.250	1	36.017.250		36.017.250	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana			Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	BPBD Kab.Malang			33 Wilayah	43.548.000	APBD	8	10.887.000	8	10.887.000	9	10.887.000	8	10.887.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022					Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	I		II		III		IV		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Sosialisasi Pengendalian Bencana di Sekolah (Pena Sekolah)	BPBD Kab.Malang			16 Sekolah	22.088.000	APBD	4	5.522.000	4	5.522.000	4	5.522.000	4	5.522.000	
1	05 03 2.02			<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	BPBD Kab.Malang				<b>1.341.672.100</b>	APBD		335.418.025		335.418.025		335.418.025		335.418.025	
1	05 03 2.02	01		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab.Malang			1 Dokumen	146.928.300	APBD		36.732.075		36.732.075	1	36.732.075		36.732.075	
1	05 03 2.02	02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab.Malang			2 Sekolah	39.540.200	APBD		9.885.050	1	9.885.050		9.885.050	1	9.885.050	
1	05 03 2.02	03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab.Malang			1 Unit	41.340.000	APBD		10.335.000		10.335.000	1	10.335.000		10.335.000	
1	05 03 2.02	04		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Kab.Malang			50 Paket	67.202.000	APBD	12	16.800.500	12	16.800.500	13	16.800.500	13	16.800.500	
1	05 03 2.02	05		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab.Malang			50 Meter	127.068.000	APBD	12	31.767.000	12	31.767.000	13	31.767.000	13	31.767.000	
1	05 03 2.02	06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD Kab.Malang			3 Desa	193.502.000	APBD	0	48.375.500	1	48.375.500	1	48.375.500	1	48.375.500	
1	05 03 2.02	07		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	BPBD Kab.Malang			2 Dokumen	162.807.000	APBD	0	40.701.750	1	40.701.750	0	40.701.750	1	40.701.750	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2022						Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	I		II		III		IV		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Rehabilitasi dan Rekontruksi															
				Jumlah Pemulihan Rekontruksi Pasca Bencana	BPBD Kab.Malang			1 Kegiatan	77.083.000	APBD	0	19.270.750	0	19.270.750	1	19.270.750	0	19.270.750	
				Jumlah SDM Paham Jitu Pasna	BPBD Kab.Malang			30 Orang	146.258.000	APBD	7	36.564.500	7	36.564.500	8	36.564.500	8	36.564.500	
				Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	BPBD Kab.Malang			30 Orang	61.593.000	APBD	7	15.398.250	7	15.398.250	8	15.398.250	8	15.398.250	
				Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	BPBD Kab.Malang			40 Orang	99.629.000	APBD	10	24.907.250	10	24.907.250	10	24.907.250	10	24.907.250	
				Jumlah Dokumen Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	BPBD Kab.Malang			2 Kegiatan	92.762.000	APBD		23.190.500	1	23.190.500		23.190.500	1	23.190.500	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab.Malang		1 Dokumen	85.959.600	APBD		21.489.900		21.489.900	1	21.489.900		21.489.900	
1	05	03	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	BPBD Kab.Malang			<b>1.626.977.000</b>	APBD		406.744.250		406.744.250		406.744.250		406.744.250	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab.Malang		71 Kali	1.000.000.000	APBD	17	250.000.000	18	250.000.000	18	250.000.000	18	250.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2022						Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber dana	I		II		III		IV			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	05 03 2.03 04			Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	BPBD Kab.Malang			600 Paket	626.977.000	APBD	150	156.744.250	150	156.744.250	150	156.744.250	150	156.744.250		
1	05 03 2.04		Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah		BPBD Kab.Malang				399.400.300	APBD		99.850.075		99.850.075		99.850.075		99.850.075		
1	05 03 2.04 02			Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	BPBD Kab.Malang			40 Orang	175.028.200	APBD	10	43.757.050	10	43.757.050	10	43.757.050	10	43.757.050		
				Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	BPBD Kab.Malang			50 Orang	66.323.500	APBD	12	16.580.875	12	16.580.875	13	16.580.875	13	16.580.875		
				Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	BPBD Kab.Malang			40 Orang	158.048.600	APBD	10	39.512.150	10	39.512.150	10	39.512.150	10	39.512.150		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, isi dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 .

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**